

04. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang

By Indrawati Yuhertiana

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang

M. Dimas Satrio^a, Indrawati^b, Subertiana^c, Aedi Hamzah^d

^aMagister Akuntansi Program Pascasarjana

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

^bFakultas Ekonomi dan Bisnis Pascasarjana

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

^cUniversitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura

^d Penulis korespondensi; E-mail: dsatrio@gmail.com

ABSTRAK

Reformasi bidang akuntansi pemerintahan yaitu perubahan dari basis akuntansi kas menjadi basis akuntansi akrual diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa implementasi akuntansi akrual sudah harus diimplementasikan pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam aspek komitmen, regulasi dan kebijakan, pengelolaan SDM dan pengelolaan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan SKPD dan SKPD. Data dianalisis menggunakan pendekatan interpretif yang merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pimpinan beserta jajaran SKPD memiliki komitmen dalam implementasi SAP berbasis akrual. Perangkat regulasi dan kebijakan juga telah dibuat, disosialisasikan dan diimplementasikan. Dalam pengelolaan SDM telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola keuangan SKPD. Sedangkan dalam pengelolaan teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Jombang telah bekerja sama dengan BPKP dalam penyediaan aplikasi keuangan SIMDA. Namun dari ketiga aspek tersebut masih terdapat kendala-kendala yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Jombang.

Kata kunci: Implementasi akrual, komitmen, pemerintah.

ABSTRACT

The reform of public sector accounting, in which changing cash accounting basis into accrual accounting basis, are expected to enhance transparency and accountability in financial management. Law No. 17 of 2003 and Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Public Sector Accounting Standards (SAP) stated that the accrual accounting has to be implemented in 2015. The research aims to understand and analyze the implementation of the accrual-based public sector accounting standards in aspects of commitment, regulations and policies, human resource and information technology management on the Local Government of Jombang. The data are collected through observation, documentation and in-depth interviews with managers and employees of the finance department of SKPD and SKPD. Data are analyzed by using an interpretive approach which is one of approaches in qualitative research. The results show that the local government head and its subordinate in SKPD are committed in the implementation of the accrual-based public sector accounting standards. The regulations and policies have also been created, disseminated and implemented. In human resource management aspect, socialization and training in financial management for SKPD has been conducted. Whereas in the information technology management, Local Government of Jombang has been working with BPKP in providing the financial applications (SIMDA). However, there are still several obstacles that need further attention by Local Government of Jombang.

Keywords: Accrual implementation, government, commitment.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari reformasi keuangan negara adalah reformasi di bidang akuntansi pemerintahan yaitu perubahan dari basis akuntansi kas menjadi basis akuntansi akrual. Dengan perubahan ini, diharapkan akan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta mengikuti *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Penelitian tentang implementasi di berbagai negara telah banyak dilakukan, hampir di seluruh bentuk di dunia (Peter Van Der Hoek 2006; Nosi dan Skocedni 2008; Antipova 2013; Athukorala dan Reil 2006; Azmi dan Mohamed 2014; Fuchs et al. 2015; Hepworth 2003; Ismail et al. 2015; Kees dan Kile 2011; Leppanen dan Nosi 2015; Locindelli 2015; Luder 2002; Moliana et al. 2013; Nosi dan Leppanen 2015; Ritoraga 2015; Sabati dan Tubertiana 2015; Widiastuti et al. 2012; Wijaya dan Dahlan 2013; Ouda (2004) mengembangkan model Luder menjelaskan adanya 3 tahap dalam adopsi akrual, tahap pengambiln keputusan, tahap implementasi akrual dan tahap evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Indonesia inovasi akuntansi dalam penerapannya melalui Indonesia mengacu pada model Ouda.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa SAP berbasis akrual *cash based accrual* (CTA) berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk meneruskan akuntansi basis akrual sampai dengan jangka waktu yang paling lama 4 (empat) tahun, setelah tahun anggaran 2010. Hal ini berarti implementasi akuntansi akrual sudah harus dilaksanakan pada tahun 2015.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Untuk mewujudkannya diperlukan aparat pemerintah yang mampu menerapkan dalam praktiknya, namun perubahan sebuah sistem

akuntansi bukanlah hal yang mudah dilakukan. Setiap perubahan memerlukan tahapan-tahapan yang panjang dan melelahkan, perubahan memerlukan penyediaan prasarana fisik, peraturan yang mendukung, sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi dan yang terpenting konsensus serta dukungan pimpinan dalam merencanakan proses perubahan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Jombang dalam aspek Komitmen, Regulasi dan Kebijakan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Teknologi Informasi. Juga kendala yang menghambat dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Teori entitas yang dikembangkan oleh Swardjono (2005), menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomis yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomis tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi, dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertimbangan dalam dan laporan keuangan merupakan media pertanggungjawabannya.

Pada mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diadopsikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam ketentuan perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara yang berbunyi tiap-tiap Kementerian, lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diadopsikan dan dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan (EP). Entitas Akuntansi, sebagai berikut:

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Menurut Robbins (2001), komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang

karyawan memiliki pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keberagatannya dalam organisasi tersebut. Regulasi adalah perintah khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjellanya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Pemerundang 64 Tahun 2013 mengonotasikan pemerintah daerah untuk menyediakan perangkat regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis akrua. Kebijakan (policy) berasal dari bahasa Latin *politis* yang berarti pemerintahan. Karena *policy* dikaitkan dengan pemerintah, maka lebih tepat jika diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan bukan kebijakan.

Berkaitan dengan pengertian kebijakan tersebut, Winarno (2007) memberikan pengertian sebagai berikut: Bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diwujudkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diwujudkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Inilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan (policy) yaitu akan negara, kebijakan yang dibuat negara. Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut Hasbiyati (2008), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Hasbiyati (2008) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personal, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lainnya. Jadi, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Sistem berasal dari bahasa latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*Systēma*). Sistem adalah

suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu relasi antar unsur tersebut dengan lingkungan.

Menurut Mukhlis (2002), sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah komputer *Accounting System*, yang dapat diartikan integrasinya peralatan, program, data, dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu komputer. Kesuksesan suatu sistem membutuhkan tujuan-tujuan yang terdefinisi. Suatu sistem dengan tujuan tertentu akan menyelesaikan lebih banyak untuk suatu organisasi, daripada sistem tanpa tujuan, sedikit tujuan, atau tujuan yang ambisius.

Reformasi akrua pemerintah merdapat momentumnya dengan keluarnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan UU 16 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang tersebut menyebabkan kotbahum *Accounting Standard* akan standar akuntansi sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh BPK. Tanpa stand *BPK* tidak dapat melaksanakan opini audit. Bentuk pertanggungjawaban APBN/APMD adalah laporan keuangan yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah menerbitkan Perm *SAP Berbasis Akrua*. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrua diwujudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Menurut Adhikari dan Heil (2003), pemerintah Belanda Baru melakukan reformasi besar pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Reformasi tersebut mengubah manajemen pemerintahan dari sistem berbasis kotahon, yang menggunakan atura yang ketat, restriktif dan plan anggaran kas, menjadi reformasi berbasis kinerja dan akuntabilitas. Keberhasilan dari

penyerapan reformasi ini memerlukan upaya yang sungguh-sungguh baik pada level strategis maupun level operasional dan merobanya pada perubahan fundamental dan perubahan yang ekstensif baik dalam manajemen operasi sektor pemerintah (sektor publik) dan juga laporan keuangan yang disajikan untuk operasi tersebut. Reformasi tersebut juga diterapkan pada sistem akuntansi yang dimutakhirkan.

Penelitian pada pemerintah Turki dilakukan oleh Kara dan Kılıç (2011). Tema yang diambil adalah penyerapan akuntansi akrual pada otoritas lokal yang mengambil studi kasus pada Pemerintah Kota Gaziantep. Praktik akuntansi pemerintah daerah telah dilakukan sesuai dengan 5018 Administrasi Publik dan Undang-Undang Pengendalian 5018 sejak tahun 2004 di Turki. Dengan undang-undang ini, akuntansi dasar kas yang sebelumnya sebagian besar kebanyakan informasi dan masalah yang tidak tercantum penting untuk pelaporan, digantikan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah atau dasar akrual. Dengan bantuan sistem akuntansi akrual, informasi tentang aset dan kewajiban dari pemerintah kota setempat benar-benar dicatat tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Langelo et al. (2015) tentang analisis penyerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bitung menunjukkan bahwa dalam membuat laporan keuangan, pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2009 tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2009 yaitu menggunakan 100% kas menuju akrual. Terdapat kendala dalam kesediaan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesediaan perangkat pendukung yang belum teruji. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang terlibat belakng pendirian akuntansi yang sesuai dan pengkohan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan.

Penelitian di Pemerintahan Inggris dilakukan oleh Hopworth (2003) membahas tentang syarat-syarat dalam kesuksesan implementasi akrual pada Pemerintah Inggris. Syarat-syarat tersebut antara lain bahwa pemerintah harus siap menerima perubahan atau reformasi di bidang keuangan, dalam hal ini dari akuntansi kas menuju akuntansi akrual; pemerintah harus mempunyai standar akuntansi akrual dan profesi akuntansi harus memiliki kapabilitas dalam menjalankannya; diperlukan pelatihan dan sosialisasi kepada pengelola keuangan yang dipertajam oleh pemerintah; keberhasilan penyerapan akuntansi akrual juga ditentukan oleh pemahaman dan kemampuan auditor eksternal pemerintah.

42 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena alamiah yang terjadi, mengumpulkan informasi, dan menyajikan dalam hasil penelitian. Menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian ini berasal dari ketertarikan terhadap fenomena yang ada yaitu bagaimana implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dalam bentuk studi kasus (Pangin 2010).

Fokus dari penelitian ini adalah implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual beserta kendala-kendalanya pada Pemerintah Kabupaten Jember dalam tiga aspek, yaitu:

- Komitmen, Budaya dan Kebijakan;
- Pengelolaan SDM;
- Pengelolaan Teknologi Informasi.

Metode Pengumpulan Data

- Observasi (pengamatan)**
Sugiono (2010) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang akan diteliti yang sebenarnya sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan menbandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.
- Wawancara**
Menurut Hadjilov dan Saputra (2002), wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Wawancara ini digunakan untuk mengungkap data atau menambah informasi tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kabupaten Jember, apakah sudah sesuai dengan PP. No. 71 Tentang SAP Berbasis Akrual.

34

Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 44

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif. 39 Pendekatan interpretif merupakan suatu teknik menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan mencari sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Jember 35 yang didirikan pada tahun 1960 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 1982, dengan luas wilayah 1.150/50 km² dan jumlah penduduk sebanyak 28.092.000 orang.

Organisasi Pemerintah Kabupaten Jember 36 diri dan 61 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008.

Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual

1. 37 Mitenen, Peraturan dan Kebijakan

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa SAP yang diterapkan dalam pemerintahan dan pengujian 38 adalah SAP berbasis akrual. Implementasi SAP berbasis akrual tersebut paling lambat dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 19 5, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya yang efektif dari pemerintah daerah untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual 22 tersebut.

Efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual ditandai dengan adanya komitmen dari Kepala Daerah dan personil kunci serta dukungan dari pihak DPRD. Seluruh pihak tersebut harus bersinergi mendukung efektivitas implementasi SAP berbasis akrual melalui persetujuan anggaran kegiatan, pemenuhan yang memadai, serta proses internalisasi perencanaan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi SAP berbasis akrual.

Permendagri 64 Tahun 2013 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan perangkat regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis akrual. Perangkat regulasi 11 kebijakan tersebut mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Ragan Akrual Standard (BAS), yang diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah. Kepala DPPKAD mengungkapkan bahwa:

"Kepala daerah berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan akrual ini, diantaranya telah menetapkan peraturan bupati tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Jember yang telah disesuaikan dengan PP. 71 Tahun 2010."

Pemerintah Kabupaten Jember telah menerbitkan Peraturan Bupati 21 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Jember. Untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual tersebut Pemerintah Kabupaten Jember telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

a. Pendo telah menyusun dan menetapkan rencana/strategi implementasi SAP berbasis akrual

Pemerintah Kabupaten Jember telah menyusun strategi implementasi penerapan SAP berbasis akrual dalam bentuk rencana aksi (Action Plan) yang merinci target, pihak yang terlibat, tahapan 41 dan output yang disusun oleh Bupati dan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Dokumen rencana aksi (Action Plan) telah di setujui dan ditandatangani oleh Bupati dan DPRD sebagai wujud komitmen bersama. Kepala DPPKAD menyatakan bahwa:

setiap tugas dan fungsi pengelola keuangan. Namun karena keterbatasan jumlah pegawai, terdapat kekurangan pegawai pengelola keuangan. Hal tersebut telah diajukan penambahan formasi ke Kementerian RI. Kendala yang dihadapi adalah terdapat SDM pengelola keuangan yang belum memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.

3. Pemerintah Kabupaten Jombang dalam aspek Teknologi Informasi menggunakan SIMDA yang mengandung SAP berbasis akrual bekerja sama dengan BPKP. Pemilihan aplikasi SIMDA buatan BPKP berdasarkan kesinambungan pendampingan dan koordinasi yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dengan aplikasi SIMDA diharapkan pembuatan laporan keuangan dapat tepat waktu, akurat dan akuntabel. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah sistem aplikasi belum sepenuhnya terintegrasi secara vertikal dan horizontal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran dan rekomendasi yang diajukan peneliti dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu perlu adanya percepatan pelaksanaan kegiatan-logistik yang telah dianggarkan sebelumnya, seperti peningkatan konektivitas jaringan SIMDA, peningkatan kemampuan pemahaman akuntansi akrual, tidak hanya definisi akrual saja tetapi lebih kepada kemampuan mengonalisa dan memahami permasalahan-permasalahan terkait akuntansi akrual. Selain itu diklat yang diadakan harus lebih mengedepankan praktik di lapangan.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM karena masih terbatasnya formasi SDM yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi, dapat dipenuhi terlebih dahulu dengan tenaga kerja dari lulusan akuntansi perguruan tinggi, dan diperbanyak diklat-diklat terkait pengelolaan keuangan. Sedangkan dalam aspek IT, diperlukan percepatan pengembangan aplikasi SIMDA agar dapat menghasilkan laporan keuangan secara akrual dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi lain seperti aplikasi pengelolaan pendapatan dan aplikasi pengelolaan aset.

Penelitian ini tidak dapat sepenuhnya mengungkap lebih mendalam mengenai implementasi SAP berbasis akrual. Hal ini dikarenakan sebagian dari aparatur pemerintah Kabupaten Jombang khususnya pada SKPD-SKPD belum dapat memberikan penjelasan lebih mendalam dan masih terbatas hanya pada pemahaman definisi SAP berbasis akrual. Sehingga peneliti lebih banyak melakukan wawancara dan menggali data dari DPPKAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Antipova, T., & Boarmistov, A. (2013). Is Russian public sector accounting in the process of modernization? An analysis of accounting reforms in Russia. *Financial Accountability and Management* 29(4), 472-478.
- Athakorola, S. L. dan B. Reul. (2001). *Accrual Budgeting and Accounting in Government and Its Relevance for Developing Member Countries*.
- Ami, A. H., dan N. Mohamed. (2014). Readiness of Malaysian public sector employees in moving towards accrual accounting for improve accountability: The case of Ministry of Education (MOE). *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 161, 100-111.
- Buang, B. (2010). *Prinsip-prinsip Akuntansi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Fuchs, S., A. Bergmann, dan S. Bräsen. (2015). The short-term impact of modern accrual accounting systems: Cross sectional evidence from Switzerland. In *Comparative International Governmental Accounting Research*. University of Malta, Valetta.
- Hadari, N. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UOM Press.
- Hasibuan, M. S. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN.
- Hopworth, N. (2003). *Prerequisites for Successful Implementation of Accrual Accounting in Central Government*. PUBLIC ACCOUNT & MANAGEMENT.
- Indriantoro, N., dan B. Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Vol. Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka BPFE.
- Ismail, S., SitiAlipahZainuddin, T. Abdullah. (2015). Accrual accounting: Issues and challenges in complying to the international accounting standard. In *International Public Sector Conference (IPSC) 2015 Hotel Mercure, Surabaya, Indonesia*.
- Kara, E., dan Y. Kılıc. (2011). Accounting Recording System On Accrual Basis At Local Authorities In Turkey: An Application In Gaziantep Local Municipality. *International Journal of Business and Social Science*, 2(12).
- Largaki, F., D. P. E. Saurung, dan S. W. Alexander. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EBMIA IV* 3 (1), 1-8.
- Leppäro, J., dan S. Nääi. (2015). Accrual accounting in Finnish local governments - Source of comparable financial information or a field of creative accounting? In *Comparative International Government Accounting Research*. University of Malta, Valetta.

23. Laatsine-B, G. (2015). A new challenge for policy makers and managers of public universities: opportunities and obstacles passing from cash to accrual system. In *Comparative International Government Accounting Research*. University of Malta, Valeta.
4. Linder, R. (2002). *Accrual Accounting and Budgeting in Government – A History of the Hessen “New Administrative Management (NVM)” Project*.
- Mei 2013. A. K. Siti-Nahila, dan L.-K. Phua. 2013. Transparency And Accountability In The Public Sector: Analysing The Adoption Of Accrual Accounting In Indonesia Paper read at Asia- American- Africa- Australia Public Finance Management Conference “Distance Technology on Good Government Governance” 21-22 October, at Faculty of Economics - Universitas Terbuka.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasi, G., dan I. Stercoulă. (2008). Implementation of accounting reforms: An empirical investigation into Italian local governments.
- Nasi, S., dan P. Leppanen. (2015). Creative use of cross-entity transactions to balance local government economies in accrual budgeting and accounting in Finland In *Comparative International Government Accounting Research*. University of Malta, Valeta.
29. Oda, H. 2004. Basic requirements model for successful implementation of accrual accounting in the public sector. *Public Fund Digest* 4 (1):78-89.
24. Peter Van Der Hook, M. (2006). From cash to accrual budgeting and accounting in the public sector: The Dutch experience. *Public Budgeting & Finance* 25 (1):32-45.
- Kitonga, I. (2015). Lessons learned from early implementation stage of accrual accounting in indonesia local government: A case study in province aya In *International Public Sector Conference (IPSC) 2015* Hotel Mercure, Surabaya, Indonesia.
- Robbins, S. (2000). *Praktika Organisasi*. Jakarta: PT. Pichallindo.
- Schott, R., dan I. Yuhertiana. (2015). Accrual implementation of government accounting: The accounting staffs readiness analysis In *International Public Sector Conference (IPSC) 2015* Hotel Mercure, Surabaya, Indonesia.
5. Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi, Perkembangan Pelaporan Keuangan*. Vol. Edisi 3. Yogyakarta: EPPK.
- Wahantati, N. P. R., K. Septiyan, dan S. Y. Wijaya. (2012). Determination of the disclosure quality and implication toward the system accrual on financial reporting public sector in Indonesia. Paper read at Asia- American- Africa- Australia Public Finance Management Conference “Public Reform For Good Government Governance”. 10-14 November, at Post Graduate Building, UPN “Veteran” Jawa Timur Surabaya, Indonesia.
- Wijaya, I. F., dan B. Dahlan. (2013). Accrual Accounting Implementation in Indonesia Paper read at Asia- American- Africa- Australia Public Finance Management Conference “Distance Technology on Good Government Governance” 21-22 October, at Faculty of Economics - Universitas Terbuka.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pustaka.

04. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Jombang

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	afandyamd.wordpress.com Internet	76 words — 1%
2	dhulqarnajn.wordpress.com Internet	74 words — 1%
3	media.neliti.com Internet	72 words — 1%
4	www.icgfm.org Internet	65 words — 1%
5	journal.stieputrabangsa.ac.id Internet	62 words — 1%
6	dpr.go.id Internet	59 words — 1%
7	Pono Pono, Pryo Sularso, Indriyana Dwi Mustikarini. "EFEKTIVITAS PERAN DAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA PULOSARI, KECAMATAN JAMBON, KABUPATEN PONOROGO) MASA JABATAN 2012 – 2017", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017 Crossref	58 words — 1%
8	repository.uhn.ac.id Internet	54 words — 1%
9	windynovita.wordpress.com	

Internet

52 words — 1 %

10 ariefh.wordpress.com
Internet

51 words — 1 %

11 repository.ar-raniry.ac.id
Internet

50 words — 1 %

12 jalanhidup.com
Internet

48 words — 1 %

13 lib.unnes.ac.id
Internet

44 words — 1 %

14 repository.unand.ac.id
Internet

43 words — 1 %

15 ayubpetrijon.blogspot.com
Internet

41 words — 1 %

16 eprints.mdp.ac.id
Internet

39 words — 1 %

17 jab.fe.uns.ac.id
Internet

38 words — 1 %

18 www.koleksiskripsi.com
Internet

33 words — 1 %

19 Marsdenia Marsdenia, Mutiha Arthaingan.
"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEBERHASILAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL : SEBUAH STUDI
EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN KOTA BOGOR", Jurnal Vokasi
Indonesia, 2016
Crossref

32 words — < 1 %

20	brage.bibsys.no Internet	30 words — < 1%
21	muhsheibulrouf-pengetahuan.blogspot.co.id Internet	30 words — < 1%
22	www.alliedacademies.org Internet	29 words — < 1%
23	repository.unair.ac.id Internet	28 words — < 1%
24	digitalcommons.fiu.edu Internet	27 words — < 1%
25	repository.ung.ac.id Internet	27 words — < 1%
26	repository.ugm.ac.id Internet	25 words — < 1%
27	www.apindo.or.id Internet	25 words — < 1%
28	art.torvergata.it Internet	23 words — < 1%
29	dspace.tul.cz Internet	22 words — < 1%
30	dppkd-kabkudus.com Internet	22 words — < 1%
31	ejournal-s1.undip.ac.id Internet	22 words — < 1%
32	www.lpimp.com Internet	21 words — < 1%

33	scoresociety.com Internet	20 words — < 1%
34	singkonkeju.blogspot.com Internet	20 words — < 1%
35	alexandria05.blogspot.com Internet	20 words — < 1%
36	tampub.uta.fi Internet	19 words — < 1%
37	eprints.unisnu.ac.id Internet	19 words — < 1%
38	wagiantotegalboto.blogspot.com Internet	19 words — < 1%
39	www.nabire.net Internet	18 words — < 1%
40	www.bpkp.go.id Internet	18 words — < 1%
41	repository.unisba.ac.id:8080 Internet	18 words — < 1%
42	www.upi-yptk.ac.id Internet	17 words — < 1%
43	ratnatrenggalek-accounting.com Internet	17 words — < 1%
44	Mahmudah Masyhuri, Supri Wahyudi Utomo. "Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko di Kota Madiun", Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2017 Crossref	16 words — < 1%
45	repository.unika.ac.id Internet	16 words — < 1%

46	www.um.edu.mt Internet	15 words — < 1%
47	span.depkeu.go.id Internet	15 words — < 1%
48	puputwaryanto.files.wordpress.com Internet	15 words — < 1%
49	www.zhaw.ch Internet	14 words — < 1%
50	ejournal.upi.edu Internet	14 words — < 1%
51	Navarro Galera, A., and M. P. Rodriguez Bolivar. "Modernizing governments in Transitional and Emerging Economies through financial reporting based on international standards", International Review of Administrative Sciences, 2011. Crossref	13 words — < 1%
52	bpkp.go.id Internet	12 words — < 1%
53	a-research.upi.edu Internet	12 words — < 1%
54	www.kppn-tanjungredeb.net Internet	11 words — < 1%
55	batubarakab.go.id Internet	10 words — < 1%
56	www.texilajournal.com Internet	10 words — < 1%
57	journal.student.uny.ac.id Internet	10 words — < 1%
58	domugreeting.blogspot.com	

	Internet	9 words — < 1%
59	www.apira2013.org Internet	9 words — < 1%
60	vmt.co.id Internet	9 words — < 1%
61	stiki.ac.id Internet	9 words — < 1%
62	pontianak.bpk.go.id Internet	9 words — < 1%
63	bag-hukum.malangkab.go.id Internet	9 words — < 1%
64	repository.widyatama.ac.id Internet	9 words — < 1%
65	kampus4u.blogspot.com.au Internet	9 words — < 1%
66	www.emrbi.org Internet	9 words — < 1%
67	repository.ipb.ac.id Internet	9 words — < 1%
68	journal.unnes.ac.id Internet	8 words — < 1%
69	gresikkab.go.id Internet	8 words — < 1%
70	pta-kendari.go.id Internet	8 words — < 1%
71	arsamediaconsultant.wordpress.com	

Internet

8 words — < 1 %

72 transparansi.blitarkab.go.id
Internet

8 words — < 1 %

73 nawarsyarif.blogspot.com
Internet

8 words — < 1 %

74 docplayer.net
Internet

8 words — < 1 %

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES OFF